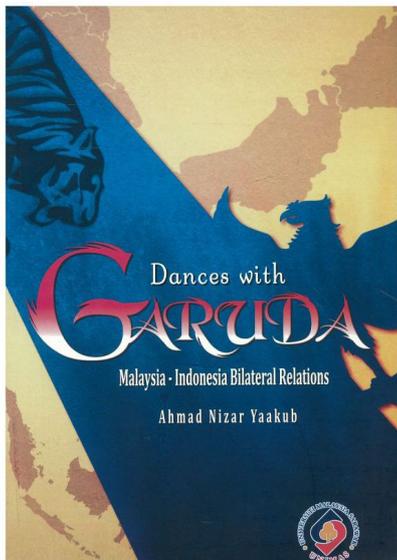


Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia: Resensi Buku

Ali Maksum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Judul Buku	: Dances with Garuda: Malaysia- Indonesia Bilateral Relations
Penulis	: Ahmad Nizar Yaakub
Penerbit	: Univ. Malaysia Sarawak
Tahun terbit	: 2013
ISBN	: 9675527463
Jumlah halaman	: 283 + xiv
Harga	: US\$35

Pasca kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Malaysia secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Walaupun demikian, hubungan antarmasyarakat sudah terjalin lama jauh sebelum lahirnya negara Malaysia dan Indonesia (Maksum dan Bustami, 2014). Dalam perjalanannya, kedua negara mengalami berbagai masalah dan tidak jarang menimbulkan ketegangan politik. Konfrontasi adalah lembaran sejarah hitam yang harus dilalui kedua Negara ketika Perang Dingin mencapai puncaknya. Begitu juga era pasca Perang Dingin, banyak masalah yang kemudian membawa hubungan kedua Negara kembali memanas oleh isu-isu "sensitif." Dalam buku ini Ahmad Nizar Yaakub, Deputi Dekan Fakultas Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) menghasilkan sebuah karya yang sangat menarik tentang hubungan kedua bangsa serumpun. Buku ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian disertasi Ph D yang telah dipromosikan di University of Western Australia. Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk mengetahui kebijakan luar negeri Malaysia dan Indonesia dalam konteks hubungan bilateral dari perspektif konstruktivisme (Yaakub., 2013). Buku ini terdiri dari tujuh bab termasuk di dalamnya pendahuluan dan kesimpulan serta hasil penelitian.

Nizar menegaskan bahwa elemen-elemen seperti budaya, etnis, persepsi elit, identitas, kepemimpinan, nasionalisme, dan agama sangat penting untuk memahami tindakan dan kebijakan luar negeri sebuah negara. Secara spesifik, Nizar menganalisis komponen "*non-material*" yang dianggap relevan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Malaysia dan Indonesia. Empat faktor "*ideational*" tersebut adalah (1) kepemimpinan, (2) keserumpunan, (3) nasionalisme, dan (4) Islam. Pada akhirnya pendapat Nizar terkait relevansi konstruktivisme dalam analisis hubungan internasional Asia Tenggara khususnya Malaysia dan Indonesia bermuara pada sebuah kesimpulan penting bahwa ada keterkaitan erat antara identitas, norma, dan kompleksitas perumusan kebijakan negara.

Dalam sejarahnya, kebijakan-kebijakan Malaysia secara terang-terangan sangat "pro-Barat." Kecenderungan tersebut ditunjukkan dengan komitmen Malaysia bergabung menjadi anggota *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) bersama Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Singapura pada tahun 1971. Sebaliknya, Indonesia tidak secara terang-terangan mengarahkan kebijakannya ke Barat, misalnya menjadi sekutu atau menjalin pakta pertahanan. Namun, faktanya Barat mendapat tempat tersendiri di era Suharto karena dinilai menguntungkan dari segi ekonomi. Selain itu, meskipun Islam adalah agama mayoritas, kedua negara mempunyai sikap yang berbeda dalam berbagai kebijakan. Indonesia misalnya secara konsisten menolak mempromosikan Islam sebagai haluan kebijakan luar negerinya. Sedangkan, Malaysia lebih berani untuk menyuarakan suaranya "*ummah*" di arena politik internasional. Sementara, dinamika politik dalam negeri Indonesia jelas lebih dinamis dan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya transformasi politik dramatis ketika reformasi 1998. Malaysia tidak mengalami *goncangan* politik yang signifikan seperti Indonesia dan nyaris komponen dalam negeri tidak terlalu berpengaruh terhadap perumusan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, pada bagian berikut dijelaskan beberapa hasil penelitian yang merupakan intisari buku ini terkait faktor-faktor dibalik perumusan kebijakan luar negeri kedua negara. Faktor-faktor yang berangkat dari konsep teori konstruktivis tersebut dipandang sangat penting dan tidak hanya mempengaruhi kebijakan luar negeri, tetapi berdampak langsung kepada hubungan bilateral kedua negara.

Faktor pertama, kepemimpinan. Nizar berpendapat bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan cara pandang pemimpin Malaysia dan Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Budaya Jawa dan Melayu adalah dua unsur dasar yang membedakan model kepemimpinan antara kedua negara. Di samping itu, latar belakang pendidikan dan karier politik juga sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Misalnya, Gus Dur dan Abdullah Badawi kental dengan nuansa pendidikan agama Islam. Sedangkan BJ Habibie,

Tun Razak, dan Susilo Bambang Yudhoyono sangat dipengaruhi oleh kultur pendidikan di Barat. Selain faktor-faktor tersebut, kepemimpinan kedua negara ternyata juga dipengaruhi oleh sistem politik yang sedang berkembang. Mayoritas presiden Indonesia terpilih secara demokratis. Kebalikannya, pemimpin Malaysia hampir semuanya berasal dari rezim Partai United Malays National Organisation (UMNO) yang telah berkuasa sejak merdeka dan belum terjadi transformasi politik signifikan seperti halnya menimpa rezim Orde Baru dan Partai Golongan Karya (Golkar) di Indonesia. Namun, Nizar tidak berusaha mengungkapkan bahwa memanasnya hubungan bilateral Malaysia-Indonesia akhir-akhir ini disebabkan adanya krisis kepemimpinan kedua Negara. Dalam istilah lain, timbulnya berbagai permasalahan hubungan Malaysia-Indonesia tidak lain karena kedua negara kehilangan sosok yang bisa meredam ketegangan diplomatik (Maksum, 2010).

Faktor kedua, keserumpunan. Pada dasarnya kedua negara khususnya antar masyarakat sama-sama mengakui tentang konsep serumpun tersebut. Nizar menyatakan bahwa konsep serumpun mengalami transformasi. Ketika era Perang Dingin rasa persaudaraan kedua negara sangat kuat dibuktikan dengan berbagai kebijakan termasuk saling membantu dalam berbagai bidang. Tetapi ada semacam *gap* atau jurang pemisah antara generasi tua dengan generasi muda dalam memahami serumpun. Kaum muda tampak kurang peduli akibat berbagai faktor termasuk kebebasan informasi yang melampaui batas. Penjelasan Nizar memang cukup lengkap tetapi tidak memberikan contoh spesifik yang bisa menjelaskan pembaca memahami konsep serumpun dalam tataran politik praktis. Sebagai contoh, tidak sedikit pemimpin Malaysia dan Indonesia yang mempunyai kerabat di kedua negara sehingga ikut berperan dalam proses negosiasi. Misalnya, Wakil Presiden Indonesia ketiga, Adam Malik ternyata banyak mempunyai kerabat di negara Bagian Perak, Malaysia. Begitu juga Ghazali Shafie juga mempunyai keluarga di Sumatera (Anuar, 2000). Terbaru, Perdana Menteri Najib Razak adalah keturunan Sultan Hasanuddin Makasar. Sedangkan Deputy Perdana Menteri Zahid Hamidi keturunan Ponorogo dan bisa berbahasa Jawa. Secara tidak langsung jelas bisa membangkitkan rasa keserumpunan kedua negara.

Faktor ketiga, nasionalisme. Nasionalisme jelas mempunyai peran besar dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri kedua negara. Namun, Nizar menjelaskan bahwa kedua negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai nasionalisme. Ahmad Nizar mengkategorikan nasionalisme menjadi dua periode yaitu masa lalu dan masa kini. Pada era tahun 1990-an, rakyat Malaysia dinilai semakin bangga dengan negaranya seiring dengan pesatnya pembangunan dan kemajuan ekonomi. Mereka semakin cinta tanah air yang semakin maju dan sejajar dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan

Jepang. Sebaliknya, tren nasionalisme di Indonesia lebih meningkat signifikan akibat meningkatnya berbagai kasus yang melibatkan Malaysia. Kasus penganiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI), hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta sengketa Ambalat semakin memicu kemarahan rakyat Indonesia kepada Malaysia. Penjelasan Ahmad Nizar sangat lengkap, tetapi tidak menjelaskan bahwa sentimen nasionalisme Indonesia cenderung provokatif dan agresif. Bahkan bisa dikatakan dalam semua aksi-aksi demonstrasi yang membantah tindakan Malaysia selalu diwarnai dengan tindakan yang bisa memicu ketegangan lebih serius seperti pembakaran bendera dan pelemparan kotoran. Sentimen nasionalisme masyarakat Indonesia terhadap beberapa kasus hubungan diplomasi tersebut umumnya “berbau anti-Malaysia” (Chong, 2012).

Faktor keempat, Islam. Menurut Nizar, faktor Islam memainkan peran yang berbeda antara di Malaysia dan Indonesia. Islam di tataran elit Indonesia memang kurang menjadi perhatian terutama era Suharto. Hal ini tidak lain karena secara kultural, Islam di Indonesia lebih didominasi budaya Jawa sehingga lahirlah istilah “Islam kejawaan” (Geertz, 1976). Seperti penjelasan Nizar, Islam di Malaysia menjadi bahan diskusi yang intensif termasuk dalam isu-isu kebijakan luar negeri. Bahkan, di Malaysia ketika pemerintahan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi muncul istilah “Islam Hadhari” yang ingin menghadirkan Islam dalam sendi-sendi kehidupan bernegara Malaysia (Fauzi, 2010). Di Indonesia, diskursus tentang politik Islam baru menggeliat menjelang akhir kepemimpinan Presiden Suharto. Pada tahun 1990 Islam kembali menjadi perhatian Pemerintah Indonesia khususnya Presiden Suharto yang salah satunya diwujudkan dengan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Yulyadi, 2007). Namun demikian, Nizar terlihat kurang spesifik dalam menguraikan konteks Islam dalam hubungan Malaysia dan Indonesia. Misalnya, adanya aktor-aktor di luar negara (*non-state actors*) yang nyata-nyata berpengaruh signifikan dalam percaturan diplomatik antarmasyarakat kedua Negara. Ketika era kepemimpinan BJ Habibie, hubungan akrab antara presiden ketiga Indonesia dan Anwar Ibrahim Deputy Perdana Menteri Malaysia sangat penting untuk diketahui. Kedua tokoh jelas mampu menghadirkan nuansa hubungan keislaman cukup kental kedua negara. Dalam istilah lain, Yulyadi (2009) menyebut bahwa eratnya hubungan “seagama Islam” antara kedua negara di era tersebut sebagai faktor “Co-Religio.”

Analisis Nizar tersebut muaranya tidak lain bahwa faktor keserumpunan sebagai elemen penting dalam konstruktivisme selalu memainkan peran di setiap proses hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia. Namun tidak sedikit kritik datang terutama dari kalangan akademisi Indonesia bahwa konsep keserumpunan perlu ditinjau ulang. Penyebabnya ialah kedua negara sering terlibat dalam berbagai kasus timbulnya berbagai kasus yang justru berakar dari keserumpunan tersebut

terutama terkait kasus sengketa produk kebudayaan. Pada saat yang sama, reaksi masyarakat Indonesia juga dirasa berlebih-lebihan. Misalnya tindakan salah satu anggota DPRD Maluku yang berniat mengajukan Malaysia ke pengadilan, internasional, di Belanda karena “klaim” negara tersebut terhadap lagu Rasa Sayange (Efantino F. & Arifin SN., 2009). Selain reaksi yang berlebih, rasa keserumpunan tersebut juga dirusak oleh persepsi yang semakin negatif masyarakat Indonesia terhadap Malaysia. Hal ini tidak lain karena Malaysia dinilai terus-menerus melakukan tindakan provokatif dan memancing ketegangan dalam berbagai kasus terutama terkait perbatasan, penganiayaan TKI, dan klaim budaya Indonesia. Oleh karena itu wajar jika sebagian kalangan mulai mempermasalahkan konsep serumpun yang sudah menjadi diskursus hubungan Malaysia dan Indonesia (Ali, 2009). Bahkan salah satu pakar hubungan internasional, Rizal Sukma mengatakan bahwa konsep serumpun tidak relevan lagi dalam proses diplomatik Indonesia dan Malaysia selain menjadikan hubungan kedua negara tidak realistis (Antara, 2007).

Sebaliknya, Nizar dan para pengkaji keserumpunan sangat optimis dengan konsep tersebut. Mereka berpendapat bahwa justru dengan bermodalkan semangat keserumpunan, kedua negara harus lebih giat lagi untuk meningkatkan kesepahaman, saling membantu, dan bekerja sama satu dengan yang lain. Menurut Yulyadi (2009) Islam adalah salah satu solusi yang perlu ditawarkan kepada kedua negara agar lebih saling memahami dan memperkuat silaturahmi. Walaupun Islam tidak menjadi agama resmi negara sebagaimana di Malaysia, tetapi peran masyarakat dan tokoh Islam Indonesia harus dimaksimalkan dalam memperkuat hubungan kedua negara. Tidak hanya dalam bidang sosial keagamaan, beberapa analisis juga merekomendasikan agar keserumpunan diperkuat melalui kerja sama dalam bidang lain. Eby Hara (2009) misalnya mengatakan bahwa kedua negara harus meningkatkan kerja sama dalam bidang pelestarian alam dan lingkungan. Hal ini penting untuk mempererat kerja sama kedua negara di tengah dominasi isu-isu yang sifatnya politik tingkat tinggi (*high politics*). Senada dengan itu, Yaakub (2013) juga sepakat bahwa di tengah era tingginya rasa saling ketergantungan kedua negara, perlu ada peningkatan kerja sama terutama dalam bidang ekonomi. Selain itu, kedua negara juga harus terus-menerus membangun kesepahaman antarelit dan antarpolitisi. Namun, menurut Weiss (2010) dengan situasi tersebut justru menjadikan kedua negara semakin pragmatis karena adanya persamaan kepentingan (*shared challenges*) setiap pemimpin termasuk di kedua negara.

Terkait keserumpunan sebagai dasar pembangunan identitas, Nizar juga memberi kesimpulan pada kedua negara tetap sadar akan rasa perasaan sedarah (*blood brotherhood*). Namun, penjelasan-penjelasan ini masih elitis seputar para pemangku kebijakan luar negeri kedua negara. Hal ini justru menampakkan bahwa peran elit yang duduk sebagai

representasi negara menunjukkan kajian ini juga sangat *“state-centric.”* Apalagi analisis tersebut hanya di sekitar perbedaan budaya antara elit Indonesia yang didominasi Jawa dan elit Malaysia yang dikuasai etnis Melayu. Padahal ada yang menarik dan perlu dijelaskan terkait perbedaan tersebut yaitu bahwa kedua negara mempunyai definisi berbeda terkait konsep Melayu. Sebagaimana penjelasan Eby Hara (2008) bahwa definisi Melayu menurut Malaysia adalah definisi politis: beragama Islam dan berbudaya Melayu. Sedangkan Indonesia, mendefinisikan Melayu sangat umum yaitu salah satu suku di Indonesia kebanyakan berdomisili di Pulau Sumatera. Konsekuensinya, jika terjadi sebuah perselisihan terkait budaya maka secara langsung menggugat keserumpunan disebabkan perbedaan penafsiran tersebut. Saling klaim adalah bukti nyata bagaimana *“irisan”* budaya menjadi masalah yang selalu menghiasi hubungan jiran Malaysia dan Indonesia. Dewi Fortuna Anwar menyatakan bahwa Malaysia sebagai negara yang semakin pesat dan maju perkembangan ekonominya, jelas akan memperkuat dan menunjukkan identitasnya. Untuk itu, Malaysia juga harus berhati-hati ketika mendefinisikan atau memperlihatkan identitasnya kepada masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan banyak warga Malaysia yang mempunyai keturunan suku-suku di Indonesia seperti Minang, Bugis, dan Jawa. Selain itu, isu-isu perselisihan budaya tentu akan menimbulkan reaksi keras warga Indonesia yang merasa *“diambil”* sebagian produk budayanya ditambah dengan provokasi dan kebebasan pers. Apalagi sebagian generasi muda di Indonesia juga tidak terlalu peduli dengan apa yang dinamakan dengan stabilitas kawasan termasuk kalangan media (Antara, 2008).

Disebabkan fenomena tersebut, pendapat Nizar yang menyatakan bahwa konsep serumpun telah mengalami pergeseran kemungkinan besar bisa diterima. Hal ini karena menurut Liow (2005) semangat keserumpunan telah mengalami perubahan dan terlihat semakin kabur terutama setelah Malaysia dan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Bahkan dalam beberapa kasus, Malaysia sebagai negara modern terlihat sering menantang Indonesia dan kurang menghormati rasa keserumpunan. Salah satu penyebabnya karena adanya *“masalah-masalah tersembunyi”* yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral (Wardhani, 1999). Selain itu, menurut Harun (2006) konsep hubungan serumpun Malaysia dan Indonesia yang digambarkan ibarat *“Abang-Adik”* juga tidak relevan lagi. Oleh karena itu, menurut pandangan Eby Hara (2008) sudah waktunya konsep keserumpunan diubah kepada sebuah hubungan yang lebih transparan, saling menguntungkan dan tidak kabur atau dalam istilah lain sebagai *“smart partnership.”*

Di akhir bagian buku, Nizar berkesimpulan bahwa konstruktivisme sangat sesuai untuk menganalisis kajian Asia Tenggara terutama Malaysia dan Indonesia. Selain itu, buku ini juga berusaha meyakinkan pembaca

bahwa faktor-faktor *non-material* yaitu kepemimpinan, keserumpunan, nasionalisme, dan Islam yang ditawarkan konstruktivisme memang memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan luar negerinya. Nizar juga menyatakan bahwa hubungan Malaysia-Indonesia mengalami perubahan terutama disebabkan oleh faktor domestik dan internasional. Namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana faktor domestik dan internasional mempengaruhi proses tersebut. Penyebabnya tidak lain karena dalam analisisnya tidak membuat sebuah kerangka teori kebijakan luar negeri yang jelas. Namun demikian buku Nizar sangat penting dan semakin memperkaya referensi kajian Malaysia dan Indonesia.

Daftar Pusaka

- Antara (2007). Rizal Sukma: Kata Serumpun Jangan Lagi untuk Hubungan RI-Malaysia
- Antara (2008). Pola Hubungan RI-Malaysia Setelah Reformasi Banyak Berubah
- Chong, J. W. (2012). "Mine, yours or ours?": The Indonesia-Malaysia disputes over shared cultural heritage *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 27(1), 1–53.
- Efantino F., dan Arifin SN. (2009). Ganyang Malaysia: Hubungan Indonesia-Malaysia Sejak Konfrontasi Sampai Konflik Ambalat. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Fauzi, A. (2010). Politically Engaged Muslims in Malaysia in the Era of Abdullah Ahmad Badawi (2003–2009). *Asian Journal of Political Science* 18(2), 154-176.
- Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Hara, E. A. (2008). *Hubungan Indonesia dan Malaysia: dari Saudara Serumpun ke 'Smart Partnership'?* Paper presented at the Seminar Internasional Indonesia-Malaysia Up Date 2008, 27-29 Mei, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Hara, E. A. (2009). *Mempererat Kembali Hubungan Serantau Malaysia-Indonesia Melalui Kerjasama Alam Sekitar*. Paper presented at the Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia, 6-8 Ogos 2009., Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Harun, R. (2006). Kerjasama dan Konflik dalam Hubungan Malaysia-Indonesia. In Ruhanas Harun (Ed.), *Malaysia's Foreign Relations: Issues and Challenges* (pp. 49-74). Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Liow, J. C. (2005). *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*. London: Routledge Curzon.
- Maksum, A. (2010). Urgensi Menjaga Hubungan Serumpun, *Jawa Pos* 18

Agustus 2010

- Maksum, A., & Bustami, R. (2014). Ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia dalam isu Tarian Pendet. *Kajian Malaysia*, 32(2), 41–72.
- Nasrullah, A. (2009). *Akar Konflik dalam Hubungan Malaysia-Indonesia*. Paper presented at the Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia 2009 “Serumpun Merentas Globalisasi”, 6-8 Ogos., Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- Nik A. N. M. (2000). *Konfrontasi Malaysia-Indonesia*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Wardhani, B. L. S. W. (1999). Indonesia-Malaysia Relations In The Post-Confrontation Era: The Role of The Serumpun Concept. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 12(3-4), 25-44.
- Weiss, M. (2010). Malaysia-Indonesia Bilateral Relations: Sibling Rivals in a Fraught Family. In N. Ganesan & R. Amer (Eds.), *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism* (pp. 171-198). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Yaakub, A. N. (2013). *Dances with Garuda: Malaysia-Indonesia Bilateral Relations*. Sarawak: Univ. Malaysia Sarawak.
- Yulyadi A., L. (2007). The Leadership of Islamic Movements in Indonesia Post-Suharto: Identifying the Missing Link between the Movements. *Jati: Journal of Southeast Asian Studies*, 12, 147-160.
- Yulyadi A., L. (2009). Indonesia-Malaysia Dispute Settlement Mechanism. In D. M. Jones & L. Yulyadi A. (Eds.), *Regionalism and Political Development in Southeast Asia* (pp. 119-129). Kuala Lumpur: University Malaya Press.
- Yulyadi, L. (2009). Hubungan Dinamik Antara Indonesia dan Malaysia Pasca Merdeka: Peranan Faktor “Co-Religio” Dalam Hubungan Dua Hala. In Mohamad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Jas Laile S. Jaafar, Adrianus Meliala & Sri Murni (Eds.), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia* (pp. 359-371). Shah Alam: Arah Publications.